

TANTANGAN DAN STRATEGI EVALUASI KINERJA BERBASIS TEKNOLOGI PADA ORGANISASI PUBLIK MENUJU SOCIETY 5.0

Linda¹, Syahrial Shaddiq², Zakky Zamrudi³

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA), Banjarmasin,
Indonesia^{1,3}

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia²

Email: linda.wongky4592@gmail.com

Keywords

*Evaluasi Kinerja Berbasis
Teknologi, Society 5.0,
Transformasi Digital*

*Technology-Based
Performance Evaluation,
Society 5.0, Digital
Transformation*

Abstract

Transformasi menuju Society 5.0 menuntut penguatan evaluasi kinerja berbasis teknologi dalam organisasi publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Teknologi digital seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) memberikan peluang besar dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Namun, penerapan evaluasi kinerja berbasis teknologi menghadapi tantangan, seperti integrasi data antarinstansi, literasi digital aparatur, dan keamanan data, yang menghambat optimalisasi teknologi dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diperlukan dalam memperkuat evaluasi kinerja berbasis teknologi menuju Society 5.0. Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research), dengan analisis isi terhadap sumber-sumber yang relevan mengenai evaluasi kinerja berbasis teknologi di sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur digital, dan penguatan regulasi keamanan siber adalah langkah utama untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, standarisasi indikator dan penggunaan open metrics untuk pengukuran kinerja yang lebih objektif juga diperlukan. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi akan memperkuat legitimasi kebijakan dan kepercayaan publik. Kesimpulannya, evaluasi kinerja berbasis teknologi menuju Society 5.0 membutuhkan integrasi data, peningkatan literasi digital, dan penerapan teknologi yang transparan dan aman.

The transformation towards Society 5.0 demands the strengthening of technology-based performance evaluation in public organizations to increase efficiency, transparency, and accountability. Digital technologies such as big data, artificial intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) provide significant opportunities for faster and more accurate data-driven decision-making. However, the implementation of technology-based performance evaluation faces challenges, such as inter-agency data integration, digital literacy of civil servants, and data security, which hinder the optimization of technology in public services. This study aims to identify the challenges and strategies needed to strengthen technology-based performance evaluation towards Society 5.0. The method used is a literature study (library research), with a content analysis of relevant

sources regarding technology-based performance evaluation in the public sector. The results show that strengthening human resource capacity, developing digital infrastructure, and strengthening cybersecurity regulations are key steps to overcome these challenges. In addition, standardization of indicators and the use of open metrics for more objective performance measurement are also needed. Public involvement in the evaluation process will strengthen policy legitimacy and public trust. In conclusion, technology-based performance evaluation towards Society 5.0 requires data integration, increased digital literacy, and transparent and secure technology implementation.

1. PENDAHULUAN

Transformasi pelayanan publik menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah pesatnya perkembangan era digital. Kemajuan teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data menuntut pemerintah untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Di luar otomatisasi layanan, transformasi digital juga mencakup bagaimana teknologi dapat menjadi alat strategis untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Novelia, 2025).

Era *Society 5.0* yang diterapkan sebagai visi pembangunan digital membawa paradigma baru dalam sektor publik, yaitu penggabungan ruang fisik dan virtual untuk menciptakan masyarakat yang lebih mengutamakan kesejahteraan manusia. Setyasih (2022) mencatat bahwa pemerintah daerah menghadapi berbagai kendala dalam implementasi transformasi digital, seperti ketimpangan infrastruktur, rendahnya tingkat kompetensi digital di kalangan ASN, serta kurangnya konsistensi dalam kebijakan (Setyasih, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi publik saja tidak cukup untuk menjamin kinerja yang optimal.

Salah satu isu utama dalam transformasi ini adalah bagaimana melakukan *evaluasi kinerja organisasi publik berbasis teknologi*. Metode evaluasi yang bersifat manual dan administratif sudah tidak lagi relevan di era digital, karena tidak dapat mengakomodasi dinamika kinerja yang terjadi secara real-time serta dampak jangka panjang dari transformasi digital itu sendiri. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan pada layanan e-government di Kota Palembang menggunakan Indeks Layanan Publik Elektronik (e-service index) untuk mengevaluasi efektivitas dan kepuasan publik secara sistematis. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan metode evaluasi yang lebih adaptif dan berbasis data digital (Heryati dkk., 2024).

Namun, penerapan evaluasi kinerja berbasis teknologi di organisasi publik juga menghadapi sejumlah hambatan. Di Kabupaten Jember, misalnya, meskipun digitalisasi membawa manfaat berupa efisiensi dan transparansi, masih ada kesenjangan signifikan dalam hal infrastruktur dan literasi digital di kalangan pejabat pemerintahan. Selain itu, masalah mengenai keamanan data dan interoperabilitas sistem menjadi perhatian utama yang dapat mengancam akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Kepemimpinan menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong perubahan menuju pemerintahan digital. Penelitian Setiadi (2022) mengungkapkan bahwa *digital leadership* yaitu pemimpin yang memahami teknologi dan mampu memimpin transformasi digital, sangat penting untuk mendorong inovasi dalam birokrasi dan memastikan integrasi teknologi dalam organisasi public (Setiadi, 2022). Tanpa kepemimpinan yang visioner dan kompeten, penerapan evaluasi kinerja berbasis teknologi akan terkendala oleh resistensi birokrasi dan pola pikir yang konservatif.

Di tingkat kebijakan, reformasi birokrasi menjadi langkah penting dalam mengarah pada Society 5.0. Penelitian oleh Yasa, Suswanta, dan kolega (2021) menunjukkan bahwa reformasi sistem merit dalam SDM aparatur sangat penting agar evaluasi kinerja berbasis teknologi dapat terintegrasi dengan sistem promosi, rekrutmen, dan pengembangan kompetensi ASN (Yasa dkk., 2021). Reformasi ini juga harus mengatasi isu budaya korupsi, masalah dalam birokrasi, serta kesiapan teknologi di tingkat organisasi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan *strategi menyeluruh* dalam memperkuat evaluasi kinerja berbasis teknologi dalam organisasi publik. Strategi ini harus mencakup peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur data yang terintegrasi, penguatan keamanan siber, serta pembentukan budaya digital. Selain itu, strategi ini harus memastikan bahwa tujuan jangka panjang Society 5.0 dapat selaras dengan praktik tata kelola pemerintahan yang human-centered, transparan, dan akuntabel.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian literatur (library research). Penulis mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema *Tantangan dan Strategi Evaluasi Kinerja Berbasis Teknologi pada Organisasi Publik Menuju Society 5.0*. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal

ilmiah, laporan penelitian, serta artikel dari situs akademik dan institusi terpercaya yang membahas perkembangan pengelolaan organisasi publik dalam menghadapi Society 5.0 dan kemajuan teknologi digital.

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu identifikasi literatur, pemilihan dokumen, pengkodean konsep-konsep utama, serta penarikan tema-tema yang relevan. Setiap dokumen yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang terkait dengan evaluasi kinerja berbasis teknologi dan penerapan kebijakan menuju Society 5.0. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang jelas dan terstruktur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode studi kepustakaan dipilih karena memberikan dasar yang kuat untuk membangun pembahasan yang komprehensif dan terarah, serta menyusun pemahaman mendalam tentang strategi-strategi yang perlu diterapkan oleh organisasi publik. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi teori-teori yang ada tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan langsung, seperti yang dijelaskan oleh Zed (2008). Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini juga memungkinkan penafsirannya dengan cara yang sistematis, menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kebijakan publik (Krippendorff, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Evaluasi Kinerja Berbasis Teknologi pada Organisasi Publik Menuju Society 5.0

Evaluasi kinerja berbasis teknologi pada organisasi publik merupakan pendekatan penilaian kinerja yang mengintegrasikan berbagai inovasi digital seperti big data, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan sistem informasi manajemen. Dalam konteks Society 5.0, teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat pendukung, tetapi menjadi fondasi dalam menciptakan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep Society 5.0 sendiri menempatkan teknologi digital sebagai mitra manusia untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh (Fukuyama, 2018).

Perubahan digital yang pesat menuntut organisasi publik untuk beradaptasi dengan cara baru dalam menilai kinerja. Evaluasi yang sebelumnya dilakukan manual kini diarahkan pada pemanfaatan data real-time yang memungkinkan pemantauan

kinerja secara lebih objektif dan terukur. Transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya manusia, misalnya, telah menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital mampu meningkatkan ketepatan analisis produktivitas, kebutuhan pelatihan, serta pengukuran kontribusi pegawai secara berkelanjutan.

Dalam bahasa sederhana, evaluasi kinerja berbasis teknologi membantu organisasi publik melihat “apa yang terjadi” secara langsung, bukan setelah laporan disusun berbulan-bulan kemudian. Sistem digital memungkinkan organisasi mendeteksi keterlambatan layanan, kesalahan prosedur, atau kebutuhan peningkatan kompetensi secara cepat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat di era Society 5.0, yang menginginkan layanan publik yang efisien, mudah diakses, dan berbasis data cerdas untuk mengurangi bias pengambilan keputusan.

Selain itu, evaluasi kinerja berbasis teknologi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya jejak digital (*digital trace*) yang tersimpan otomatis, setiap proses pelayanan dapat ditinjau kembali jika terjadi kendala. Pendekatan ini relevan dengan tuntutan era Society 5.0 yang menekankan tata kelola publik yang lebih terbuka dan *human-centered*. Pemanfaatan sistem digital ini juga sejalan dengan urgensi peningkatan kesiapan aparatur dalam memanfaatkan teknologi, sebagaimana disoroti Kusuma (2022) bahwa aparatur negara perlu mampu mengoperasikan TIK dan memanfaatkan data untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Kusuma, 2022).

Evaluasi berbasis teknologi juga memainkan peran penting dalam mendorong inovasi pelayanan. Data kinerja yang dikumpulkan secara otomatis dapat dianalisis untuk memprediksi hambatan pelayanan, mengevaluasi efektivitas program, dan merancang kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap perubahan. Hal ini diperkuat oleh pandangan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi, ketepatan informasi, serta memperkuat kemampuan organisasi dalam membaca tren kebutuhan masyarakat (Putra dkk., 2022)

Secara keseluruhan, evaluasi kinerja berbasis teknologi dalam organisasi publik merupakan proses modern yang memadukan teknologi digital dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan. Pada era Society 5.0, konsep evaluasi ini menjadi semakin penting karena organisasi dituntut tidak hanya menghasilkan kinerja yang tinggi, tetapi juga memastikan layanan publik bersifat inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kompleksitas masalah sosial. Transformasi ini hanya akan berhasil

jika didukung oleh kesiapan aparatur, budaya kerja yang adaptif, serta sistem data yang terintegrasi.

B. Tantangan Evaluasi Kinerja Berbasis Teknologi di Organisasi Publik

Evaluasi kinerja berbasis teknologi di organisasi publik menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, yang menghambat efektivitas dan penerapan sistem evaluasi yang optimal. Tantangan utama ini meliputi masalah integrasi data antarinstansi, literasi digital aparatur negara, keamanan data, inkonsistensi kebijakan, faktor budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi canggih.

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan integrasi data antarinstansi. Banyak sistem digital di pemerintahan yang masih berjalan secara terpisah, sehingga data kinerja tidak dapat diolah secara komprehensif untuk evaluasi real-time. Hal ini mengakibatkan proses evaluasi yang terhambat dan tidak dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja organisasi secara keseluruhan. Temuan ini tercermin dalam indeks e-government, yang belum menunjukkan konsistensi dalam mengintegrasikan lintas domain layanan, sehingga kualitas pemantauan kinerja digital menjadi terfragmentasi (Nurhidayat & Nurmandi, 2024).

Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi tantangan signifikan. Banyak ASN yang belum menguasai teknologi informasi yang digunakan dalam evaluasi kinerja, seperti manajemen data digital dan prinsip-prinsip keamanan informasi. Akibatnya, teknologi tersebut hanya dimanfaatkan secara administratif dan tidak optimal untuk menghasilkan evaluasi berbasis bukti yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja. Studi tentang implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan bahwa kurangnya kompetensi dan kesiapan SDM dalam bidang teknologi masih menjadi hambatan utama dalam transformasi digital sektor publik (Sundari & Sartika, 2025).

Keamanan data dan kerentanan sistem informasi juga menjadi tantangan besar dalam penerapan evaluasi kinerja berbasis teknologi. Pemerintah sering kali menghadapi celah dalam sistem pengamanan, seperti proses enkripsi, autentikasi pengguna, dan proteksi data. Jika mekanisme pengamanan ini tidak diperkuat, maka data sensitif yang digunakan untuk evaluasi kinerja dapat terancam kebocoran atau serangan siber. Temuan-temuan sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk mengamankan data, kerentanannya masih cukup tinggi, yang dapat meningkatkan risiko dalam penggunaan sistem evaluasi digital (Yazid & Karmila, 2024).

Tantangan lainnya muncul dari ketidaksinkronan kebijakan dan standar teknis antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kapasitas infrastruktur digital di setiap daerah menyebabkan penerapan evaluasi berbasis teknologi tidak seragam. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan instrumen evaluasi digital dengan kebutuhan lokal, sehingga memperlambat implementasi sistem evaluasi di tingkat daerah. Inkonsistensi regulasi ini menyebabkan proses evaluasi berjalan tidak secepat yang diharapkan dan dengan kualitas yang bervariasi.

Selain faktor teknis, budaya organisasi juga turut memperkuat hambatan dalam penerapan evaluasi berbasis teknologi. Banyak aparatur negara yang masih terbiasa dengan cara kerja manual dan cenderung menolak perubahan. Persepsi risiko, ketidakpastian, dan ketidakpahaman terhadap manfaat jangka panjang teknologi seringkali menjadi alasan resistensi terhadap transformasi digital. Temuan tentang resistensi pegawai terhadap perubahan teknologi menunjukkan bahwa faktor budaya menjadi penghalang utama dalam adopsi evaluasi berbasis teknologi di sektor publik (Kristin Handayani, 2024).

Terakhir, tantangan terkait pemanfaatan teknologi canggih seperti analitik data, big data, dan kecerdasan buatan (AI) juga masih cukup besar. Meskipun teknologi ini dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas evaluasi kinerja, banyak instansi pemerintah yang belum memiliki kapasitas analitik yang memadai, serta dukungan teknis dan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Akibatnya, evaluasi kinerja masih bergantung pada pendekatan tradisional yang tidak memanfaatkan potensi penuh dari teknologi canggih.

C. Strategi Penguatan Evaluasi Kinerja Berbasis Teknologi Menuju Society 5.0

Dalam konteks Society 5.0, penguatan evaluasi kinerja berbasis teknologi menjadi elemen kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan inovasi digital, memperkuat regulasi, dan membangun kapasitas kelembagaan yang mendukung evaluasi kinerja berbasis bukti. Evaluasi yang transparan dan berbasis data akan memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat dipantau secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sambil menjaga keseimbangan antara transparansi, perlindungan data pribadi, dan legitimasi publik.

Salah satu aspek penting dalam penguatan evaluasi kinerja berbasis teknologi adalah integrasi data antarinstansi yang memungkinkan pengambilan keputusan

berbasis bukti secara lebih cepat dan akurat. Interoperabilitas basis data antar instansi dan harmonisasi standar evaluasi akan mengurangi redundansi proses, yang sering kali memperlambat pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Dengan adanya open metrics dan standarisasi indikator, evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan cara yang lebih obyektif dan terukur. Pengukuran kualitas layanan digital, termasuk kemudahan, kebermanfaatan, dan keandalan, perlu dipadukan dengan metrik kematangan transformasi, yang memastikan bahwa perbaikan berkelanjutan dapat dipantau dan diterapkan.

Selain itu, evaluasi kinerja berbasis teknologi harus memperhatikan literasi digital di kalangan aparatur negara dan masyarakat. Untuk itu, penguatan partisipasi publik dalam evaluasi kinerja sangat penting. Ko-produksi layanan yang melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan kanal partisipatif berbasis e-government akan memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah juga akan memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Temuan dari beberapa daerah menunjukkan bahwa partisipasi publik yang seimbang dengan ruang diskresi administratif dapat meningkatkan kualitas layanan, seperti dalam hal perizinan.

Untuk memastikan transformasi digital evaluasi kinerja berjalan dengan efektif, diperlukan peta jalan berjenjang untuk implementasi yang terstruktur. Dalam horizon jangka pendek (12-18 bulan), pemerintah harus memfokuskan pada pembentukan fondasi, termasuk pedoman interoperabilitas data, penerapan regulatory sandbox untuk teknologi baru, dan penerapan algorithmic impact assessment pada layanan prioritas. Pada horizon menengah (18-36 bulan), perhatian harus diarahkan pada penguatan tata kelola evaluasi dengan pengadaan berbasis hasil, pembentukan fungsi audit algoritmik independen, serta penerapan open metrics lintas instansi. Di horizon panjang (>36 bulan), fokus utama adalah pada konsolidasi evaluasi kinerja, termasuk integrasi umpan balik warga secara real-time dalam siklus kebijakan dan memastikan penjaminan mutu berkelanjutan melalui kerangka kematangan transformasi (Rizalihan dkk., 2025).

Keberlanjutan strategi dalam penguatan evaluasi kinerja berbasis teknologi menuju Society 5.0 memerlukan penyusunan roadmap yang fleksibel dan mampu merespons perubahan teknologi secara dinamis. Peta jalan tersebut harus

mengintegrasikan proses identifikasi risiko, pemantauan capaian, serta evaluasi dampak teknologi ke dalam satu kerangka operasional yang menyeluruh. Dengan demikian, pemerintah memiliki mekanisme yang sistematis untuk menilai efektivitas implementasi digital sekaligus menetapkan tolok ukur inovasi yang harus dicapai. Melalui pendekatan evaluatif yang berorientasi pada umpan balik berkelanjutan, organisasi publik dapat menyesuaikan strategi secara cepat sesuai kebutuhan lapangan dan perkembangan teknologi, sehingga proses transformasi tidak berhenti pada tahap adopsi, tetapi berlanjut ke tahap pematangan digital secara menyeluruh.

Selain itu, keberlanjutan transformasi digital juga menuntut penetapan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil, terutama dalam konteks penguatan evaluasi kinerja sektor publik. Integrasi prinsip keberlanjutan—seperti efisiensi sumber daya, keandalan sistem, perlindungan data, dan manfaat sosial—ke dalam strategi digital akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat legitimasi kebijakan. Evaluasi yang dilakukan secara rutin memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kendala operasional sekaligus memperbaiki arah strategi secara real-time. Dengan cara ini, implementasi teknologi dalam evaluasi kinerja bukan hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi bagian dari pembangunan tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan menuju masyarakat cerdas Society 5.0 (Bilgah dkk., 2025).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penguatan evaluasi kinerja berbasis teknologi merupakan langkah penting dalam mempercepat transformasi pemerintahan menuju Society 5.0. Teknologi digital seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Evaluasi kinerja yang berbasis data ini dapat memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dengan tetap menjaga keseimbangan antara transparansi, perlindungan data pribadi, dan legitimasi publik.

Namun, implementasi evaluasi kinerja berbasis teknologi di organisasi publik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan integrasi data

antarinstansi, rendahnya literasi digital aparatur negara, dan masalah keamanan data yang mengancam integritas sistem evaluasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu ada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur yang lebih baik, serta peningkatan keamanan siber. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih cepat dan akurat.

Agar proses transformasi digital evaluasi kinerja ini dapat berjalan dengan efektif, diperlukan peta jalan yang jelas dan terstruktur, yang mencakup langkah-langkah untuk memperkuat tata kelola, penerapan open metrics, dan penguatan audit algoritmik independen. Dengan demikian, evaluasi kinerja berbasis teknologi tidak hanya menjadi alat untuk mengukur kinerja, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa pelayanan publik menjadi lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era Society 5.0.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bilgah, Agustina, T., & Kurniawan, A. (2025). FinTech, Transformasi Bisnis, dan Manajemen Keuangan di Era 4.0. Takaza Innovatiox Labs.
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society. Japan Economy Foundation Journal - Japan SPOTLIGHT.
- Heryati, A., Zaliman, I., Terriavini, & Mulyati. (2024). Evaluasi Kinerja E-Government dengan Menggunakan Indeks Layanan Publik Elektronik sebagai Standar Benchmarking Layanan Publik. MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning Computer Science, 4(1), 51–56.
- Krippendorff, K. (2013). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. Sage Publications.
- Kusuma, F. K. (2022). Kesiapan dan Tantangan Menghadapi Aparatur Sipil Negara dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Guna Mempercepat Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Digital Society 5.0. Syntax Literate: Jurnal Imiah Indonesia, 7(1), 731–739.
- Novelia, M. (2025). Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dengan Pemanfaatan Teknologi Digital Melalui Tinjauan Tata Kelola di Kabupaten Jember. Kybernologi: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, 3(1), 310–319.
- Nurhidayat, & Nurmandi, A. (2024). Evaluation of the Challenges of E-Government

- Implementation: Analysis of the E-Government Development Index in Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(2), 371–383.
- Putra, R. A., Putra, R. B., & Hasmaynelis Fitri. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Transformasi Digital Di Era Industri 4.0. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 2(2), 8–17.
- Rizalihadi, T., Satispi, E., & Mandega, Y. (2025). *Manajemen Pelayanan Publik: Teori, Regulasi, Inovasi, dan Tantangan Era Society 5.0*. Widina Media Utama.
- Setiadi, A. (2022). Analisis Digital Leadership dan Transformasi Digital dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(12), 6514–6528.
- Setyasih, E. T. (2022). Transformasi Digital Pemerintahan Daerah di Era Society 5.0: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *JURNAL PAPTUNG*, 5(3), 59–66.
- Sundari, W., & Sartika, I. (2025). Advancing Public Service Quality through Indonesia's Electronic-Based Government System. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 4(8), 902–911.
- Yasa, A., Suswanta, Rafi, M., & Rahmanto, F. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42.
- Yazid, I. D., & Karmila, A. P. (2024). Menuju Pemerintahan Digital: Tantangan dan Transformasi Indeks E-Government di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(13), 387–396.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.